

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemerintah merupakan organisasi yang diberikan wewenang untuk mengatur kepentingan masyarakat umum serta lembaga pemerintah dibuat untuk menjalankan aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai organisasi yang tidak untuk mengejar keuntungan, lembaga pemerintah memiliki tujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan terus meningkatkan pelayanan tersebut dimasa yang akan datang.

Masa setelah terjadinya reformasi merupakan awal mulanya memasuki era baru bagi pengelolaan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten. Hal itu terlihat dari setelah diterbitkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam perkembangannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tersebut mengalami beberapa kali perubahan dimulai menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian yang terbaru menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 5 ayat 4 dijelaskan bahwa “penyelenggaraan urusan di Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan” (Publika). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah bisa mengatur secara mandiri tanpa ada tekanan dari pemerintah pusat terkecuali ada beberapa hal yang masih diatur pula oleh pemerintah pusat. Adanya otonomi daerah ini, dapat memberikan kemudahan bagi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan bagi daerah sendiri. Namun setiap pemerintah daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang telah dikerjakan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 320 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kepada DPRD(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dengan dilampiri

laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir” (publika,2018).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam melaksanakan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (Wahyu, 2015):

1. Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan antar generasi
5. Evaluasi

Penilaian Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah. Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja

tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Salah satu alat untuk menganalisa kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan menggunakan teknik analisis tertentu untuk memahami masalah dan peluang yang terdapat laporan keuangan yang berguna sekali dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu tehnik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. “Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka atau lebih yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan” (Mahmudi, 2016:90). Hasil analisis rasio ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam menilai dan mengukur (Halim, 2007):

1. Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah
2. Efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah
3. Sejauh mana aktivitas pemereintah Kabupaten Bandung Barat dalam membelanjakan daerahnya
4. Pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu

Penggunaan analisis laporan keuangan menggunakan analisis rasio merupakan hal yang sudah lazim dilakukan pada perusahaan. Hal ini dikarenakan hasil laporan keuangan ini banyak dimanfaatkan oleh investor sehingga sering digunakan. Berbeda dengan penggunaan pada pemerintah daerah, analisis laporan keuangan masih jarang digunakan terutama oleh masyarakat. Analisis laporan keuangan pada pemerintah daerah lebih sering digunakan untuk evaluasi kerja oleh DPRD. Namun pada dasarnya manfaat dari dilakukannya analisis laporan keuangan juga dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu untuk mengetahui hasil kerja pemerintah daerahnya. Penggunaan analisis laporan keuangan tersebut dapat dilakukan di setiap daerah termasuk dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Berikut ini tabel 1.1 yang menunjukkan Rasio Kemandirian Kabupaten Bandung Barat 2015-2017.

Tabel 1.1
Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Bandung Barat 2015-2017

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	%
2015	314.621.268.982	1,839,587,823,643	17.1
2016	376.220.675.006	1.786.253.844.497	21,06
2017	409.916.387.808	2.093.378.559.758	19,58

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bandung Barat

Besarnya pendapatan transfer masih mendominasi penerimaan daerah dibandingkan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Terlihat pada tabel diatas pada tahun 2016 Kemandirian Daerah mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2017 Kemandirian Daerah Kabupaten Bandung Barat mengalami Penurunan lagi. Hal ini bertentangan dengan teori Halim (2012) yang menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan dana terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD.

Berikut ini tabel 1.2 yang menunjukkan Efektivitas PAD Kabupaten Bandung Barat 2015-2017

Tabel 1.2
Efektivitas PAD Kabupaten Bandung Barat 2015-2017

Tahun	Target	Realisasi PAD	Persentase	Nilai
2015	477.203.549.35	314.621.268.9	65,93	Tidak efektif
	6	82		

2016	497.227.266. 893	376.220.675.0 06	75,66	Tidak Efektif
2017	623.102.522.33 2	409.916.387.8 08	65,78	Tidak Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bandung Barat

PAD Kabupaten Bandung Barat selama tiga tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini bertentangan dengan teori Halim (2012) yang menyatakan Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan yang dicapai Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan daerah semakin”baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik dan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan di Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2015-2017”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi adalah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, antara lain:

1. Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan pada tahun 2017, hal ini bertentangan dengan teori Halim (2012) yang menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin rendah Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan dana terhadap bantuan pihak eksternal semakin tinggi.
2. Rasio Efektivitas PAD tahun 2017 mengalami penurunan,hal ini bertentangan dengan teori Halim (2012) yang menyatakan Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan yang dicapai Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan.Semakin tinggi Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengambil rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2015-2017 berdasarkan Rasio Kemandirian PAD ?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2015-2017 berdasarkan Rasio Efektivitas PAD?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada Tahun Anggaran 2015-2017 berdasarkan Rasio Efisiensi Keuangan”Daerah?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada Tahun Anggaran 2015-2017 berdasarkan Rasio Keserasian ?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada Tahun Anggaran 2015-2017 berdasarkan Rasio Pertumbuhan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama Tahun 2015-2017 berdasarkan Rasio Kemandiran PAD.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama Tahun 2015-2017 berdasarkan Rasio Efektivitas PAD.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama Tahun 2015-2017 berdasarkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama Tahun 2015-2017 berdasarkan Rasio Keserasian.
5. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama Tahun 2015-2017 berdasarkan Rasio Pertumbuhan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini berharap dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Bagi penulis, seluruh rangkaian penelitian serta hasilnya diharapkan dapat lebih memahami dan menambah pengetahuan dalam analisis laporan keuangan sektor publik dengan menggunakan rasio keuangan daerah dan menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan pada Jurusan Administrasi Publik terutama dalam konsentrasi Akuntansi Keuangan Sektor Publik.

2. Kegunaan Praktisi

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan dalam menggali dan mengelola potensi daerah untuk meningkatkan PAD, meningkatkan kinerja keuangan daerah serta meningkatkan kualitas dalam penyajian laporan keuangan daerahnya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kajian teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teorinya Mahmudi tentang analisis laporan keuangan yang merupakan interpretasi angka-angka dalam laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan yang hasil dari analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik. Menganalisis laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam waktu tertentu. Analisis Laporan Keuangan memerlukan teknik tertentu agar kegiatan analisis tersebut bermanfaat bagi para pengambil keputusan. Terdapat beberapa teknik analisis laporan keuangan, antara lain (Mahmudi, 2016:90):

- a. Analisis Varians
- b. Analisis Rasio
- c. Analisis Pertumbuhan
- d. Analisis Regresi
- e. Analisis Prediksi

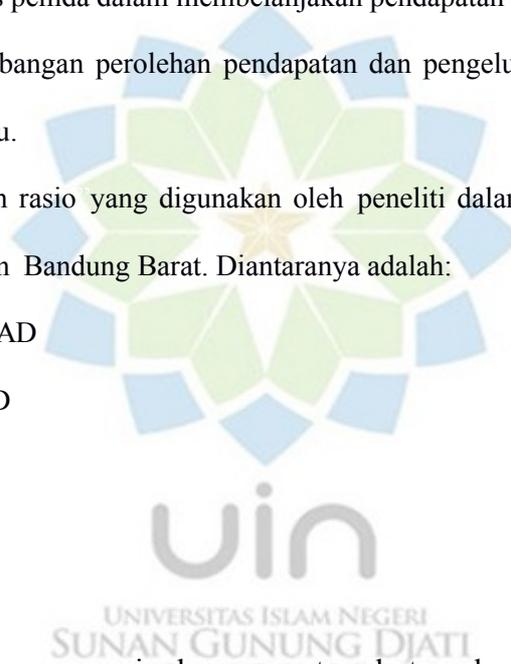
Salah satu teknik analisis laporan keuangan yang paling sering digunakan adalah analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Analisis rasio tersebut dapat dijadikan tolak ukur bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis rasio ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam menilai dan mengukur (Halim, 2007):

1. Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah;
2. Efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah;
3. Sejauh mana aktivitas pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya;
4. Pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

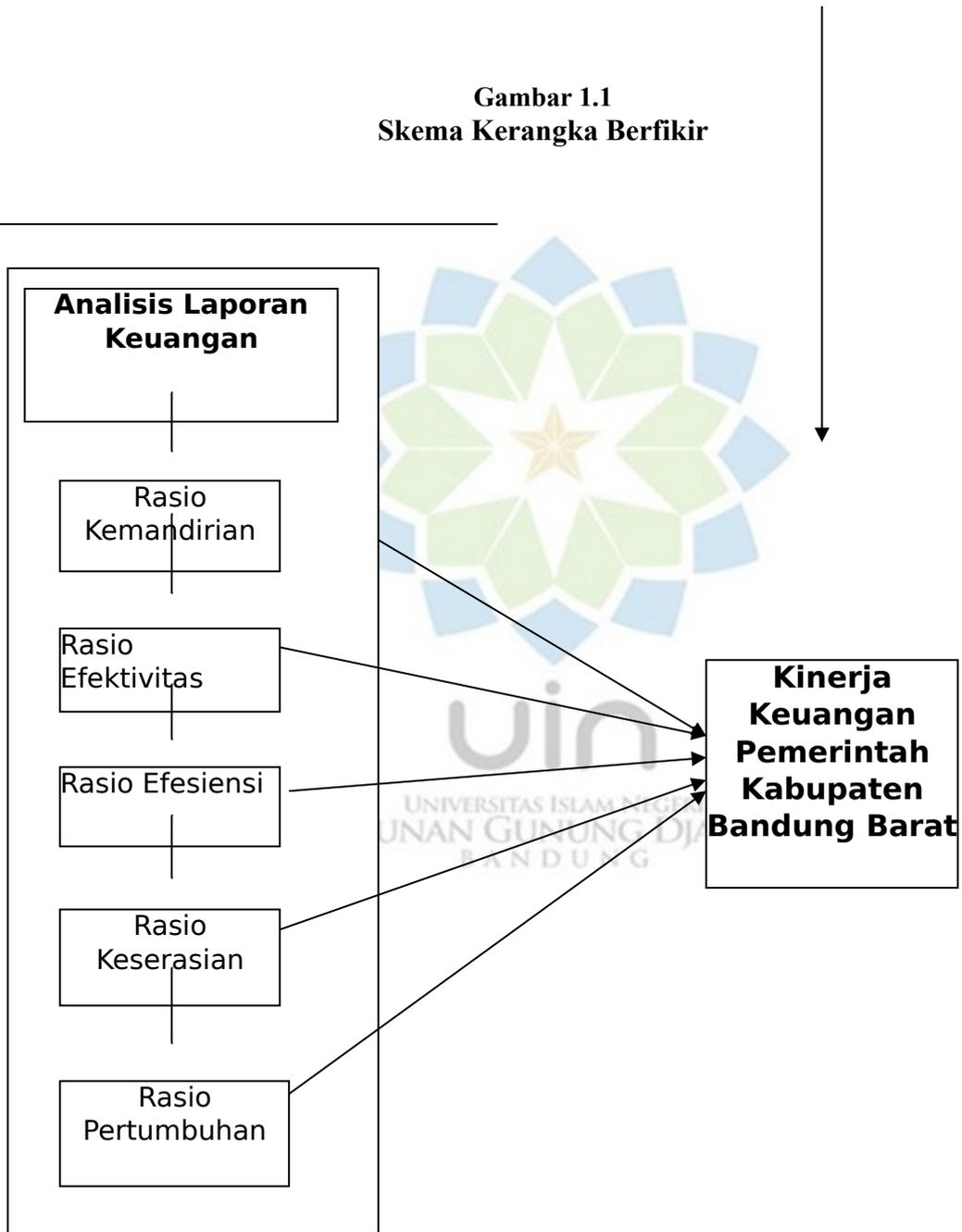
Terdapat lima macam rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Diantaranya adalah:

1. Rasio Kemandirian PAD
2. Rasio Efektivitas PAD
3. Rasio Efisiensi PAD
4. Rasio Keserasian
5. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan penggunaan rasio keuangan tersebut maka dapat terlihat bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2015-2017.



Gambar 1.1
Skema Kerangka Berfikir



Sumber : (Mahmudi, 2016)